



Implementasi Perpres Percepatan Manajemen Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Rawa Makmur Permai Kota Bengkulu

Marsidi ¹⁾ ; Herman Ginting ²⁾ ; Askani ³⁾

¹⁾ Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bengkulu

Email: ¹⁾ marsidi0459@gmail.com ; ²⁾ hermanginting2109@gmail.com

How to Cite :

Marsidi, M., Ginting, H., Askani, A. (2023). Implementasi Perpres Percepatan Manajemen Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Rawa Makmur Permai Kota Bengkulu. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(2). doi: <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i2>

ARTICLE HISTORY

Received [25 Mei 2023]

Revised [26 Mei 2023]

Accepted [30 Juli 2023]

KEYWORDS

implementation, Presidential Regulation No. 15 of 2010, the acceleration of countermeasures poverty, beautiful prosperous swamps, and PKH.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi dengan meningkatnya angka kemiskinan di Kelurahan Rawa Makmur Permai dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat maka Implementasi Peraturan Presiden NO. 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Rawa Makmur Permai dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi dan birokrasi implementasi Peraturan Presiden NO. 15 Tahun 2010 tentang Penanggulangan kemiskinan untuk mengurangi angka kemiskinan melalui Program PKH di Kelurahan Rawa Makmur Permai dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Presiden NO. 15 Tahun 2010 dalam menanggulangi kemiskinan melalui program PKH di Kelurahan Rawa Makmur Permai. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif, untuk sumber data menggunakan data primer dan sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah wawancara dilakukan bersama informan terpilih, maka peneliti akan mengolah data dengan menggunakan teknik analisa data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dan birokrasi dalam implementasi Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan untuk mengurangi angka kemiskinan melalui Program PKH di Rawa Makmur Permai secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang nyata dan merupakan hal terpenting dalam terlaksananya dengan baik Perpres No. 15 Tahun 2010 Tentang tentang percepatan Penanggulangan kemiskinan untuk mengurangi angka kemiskinan melalui Program PKH di Rawa Makmur Permai. Komunikasi dan birokrasi berjalan dengan baik di RT 10 Kelurahan Rawa Makmur Permai. Ketersediaan sumber daya terutama sumber daya manusia dalam menjalankan Program PKH merupakan satu faktor yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan program PKH di Kelurahan Rawa Makmur Permai. Terutama untuk 3 (tiga) RT yang menjadi fokus penelitian sumber daya manusia yang mencukupi membuat implementasi penanggulangan dapat terlaksana dengan baik dengan adanya sumber daya yang bekerja dengan baik saat sebelum dan sesudah pemberian bantuan. Adapun faktor penghambat dalam Implementai Peraturan Presiden NO. 15 Tahun 2010 tentang percepatan Penanggulangan kemiskinan untuk mengurangi angka kemiskinan melalui Program PKH di Rawa Makmur

Permai yaitu peran pendamping dan koordinasi antar dinas terkait yang belum semuanya bekerja dengan baik.

ABSTRACT

This research is motivated by the increasing poverty rate in Rawa Makmur Permai Village and to improve the welfare of the local community, the Implementation of Presidential Regulation No. 15 of 2010 concerning the acceleration of poverty reduction through the Family Hope Program (PKH) in Rawa Makmur Permai Village was implemented. This study aims to determine the communication and bureaucracy implementation of Presidential Regulation No. 15 of 2010 concerning Poverty Alleviation to reduce poverty through the PKH Program in Rawa Makmur Permai Village and to find out the inhibiting factors in the implementation of Presidential Regulation No. 15 of 2010 in tackling poverty through the PKH program in Rawa Makmur Permai Village. The type of research in this study is qualitative with descriptive methods, for data sources using primary and secondary data using collection techniques, namely observation, interviews and documentation. After the interviews were conducted with the selected informants, the researcher would process the data using data analysis techniques, namely data collection, data reduction, data presentation, and conclusion. The results showed that communication and bureaucracy in the implementation of Presidential Regulation no. 15 of 2010 concerning the acceleration of poverty reduction to reduce poverty through the PKH Program in Rawa Makmur Permai together has a real influence and is the most important thing in the proper implementation of Presidential Decree No. 15 of 2010 concerning the acceleration of poverty alleviation to reduce poverty through the PKH Program in Rawa Makmur Permai. Communication and bureaucracy went well in RT 10, Rawa Makmur Permai. The availability of resources, especially human resources in carrying out the PKH Program is a factor that needs to be considered to realize the PKH program in Rawa Makmur Permai Village. Especially for the 3 (three) RTs which are the focus of research, sufficient human resources make the implementation of the response to be carried out properly with the presence of resources that work well before and after the provision of assistance. The inhibiting factors in the implementation of Presidential Regulation No. 15 of 2010 concerning the acceleration of poverty alleviation to reduce poverty through the PKH Program in Rawa Makmur Permai, namely the role of companion and coordination between related agencies which have not all worked well.

PENDAHULUAN

Persoalan yang menjadi masalah sosial yang bersifat mendunia saat ini adalah kemiskinan. Kemiskinan dapat di artikan sebagai masalah kemanusiaan yang dapat menghambat kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia kesejahteraan bukan lagi hal yang baru karena kesejahteraan sosial merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk membantu masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhannya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga menegaskan bahwa kesejahteraan sosial ialah suatu institusi atau bidang yang dimana melibatkan aktivitas terorganisir yang dilakukan dengan baik oleh lembaga pemerintah maupun swasta guna untuk mencegah, mengatasi atau memberi kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok serta masyarakat.

Permasalahan kemiskinan muncul karena ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Indonesia merupakan Negara berkembang dan memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Oleh karena itu pemerintah sangat berperan penting dalam upaya, kebijakan mengurangi angka kemiskinan di Indonesia agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena angka kemiskinan di Indonesia mengalami naik turun yang tidak bisa dipastikan persentase penurunannya setiap tahun dan jumlah penduduk miskin mengalami penambahan di setiap

provinsi di Indonesia setiap tahunnya. Berdasarkan sumber data jumlah penduduk miskin 5 (lima) tahun terakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu yang merupakan tempat dimana peneliti tinggal mengalami kenaikan dan penurunan yang signifikan tahun 2020 jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 302 penduduk dari 298 penduduk pada tahun 2019. Melihat angka tersebut maka kemiskinan selain menjadi masalah sosial juga dapat diartikan sebagai masalah kemanusiaan yang mampu menghambat terciptanya kesejahteraan masyarakat dan menjadi persoalan mendasar yang di hadapi oleh pemerintah. Meskipun kemiskinan disebabkan karena ketidak mampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari. Pemerintah sangat berperan penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi angka kemiskinan.

Beberapa upaya penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta untuk memutus kemiskinan sudah banyak dilakukan pemerintah dan sudah banyak di dukung oleh aturan dan juga peraturan Presiden, seperti Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial , dan juga Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang penanggulangan fakir miskin. Sebagai bentuk perhatian pemerintah Kota Bengkulu terkait masalah di atas melalui Dinas Sosial, Pemerintah Kota Bengkulu menyalurkan kartu Program Keluarga Harapan (PKH) untuk masyarakat yang kurang mampu salah satunya di Kelurahan Rawa Makmur Permai sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) Kepala Keluarga (KK). Program ini dilaksanakan oleh Pendamping Sosial PKH yaitu dengan memastikan bantuan tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu dan melayani fasilitas penanganan Sistem Pengaduan Masyarakat (SPM). Pendamping sosial PKH harus benar-benar mampu menjadi agen perubahan sosial di masyarakat. Selain itu pelaksanaan untuk menanggulangi kemiskinan masih mengalami beberapa kendala. Berdasarkan permasalahan dan kondisi tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti Implementasi Perpres Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Rawa Makmur Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu (Studi Perpres No. 15 Tahun 2010).

LANDASAN TEORI

Teori Kemiskinan dan Pengentasan Kemiskinan

Program Keluarga Harapan didasarkan pada pemahaman tentang teori kemiskinan yang menyatakan bahwa kemiskinan bukan hanya masalah kekurangan sumber daya ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, kultural, dan kelembagaan. Upaya pengentasan kemiskinan harus melibatkan pendekatan terpadu dan holistik yang mengakomodasi berbagai dimensi kemiskinan.

Teori Pilihan Rasional

Teori ini menyatakan bahwa individu cenderung memilih tindakan atau keputusan yang memberikan manfaat terbesar bagi kepentingan pribadi dan keluarga mereka. Dengan memberikan bantuan sosial dan insentif bagi peserta Program Keluarga Harapan, diharapkan akan mendorong keluarga miskin untuk berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab dalam upaya mengatasi kemiskinan.

Teori Ketergantungan dan Empowerment

Program Keluarga Harapan berusaha untuk mengurangi ketergantungan keluarga miskin terhadap bantuan sosial jangka panjang dengan memberikan penguatan dan pemberdayaan melalui pelatihan keterampilan, pendidikan, dan bimbingan konseling. Teori ini menyatakan bahwa pemberdayaan individu dan komunitas dapat mengubah pola ketergantungan menjadi kemandirian.

Teori Sistem Ekologi

Teori ini menekankan pentingnya memahami interaksi antara individu dan lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi kemiskinan. Dengan mempertimbangkan konteks dan faktor-faktor sosial yang mempengaruhi keluarga miskin di Kelurahan Rawa Makmur Permai, program ini dapat merancang intervensi yang lebih tepat dan relevan untuk memecahkan masalah kemiskinan.

Teori Pemberdayaan Perempuan

Program Keluarga Harapan memiliki fokus khusus pada pemberdayaan perempuan sebagai agen perubahan dalam keluarga dan masyarakat. Teori ini menekankan pentingnya memberdayakan perempuan melalui akses terhadap pendidikan, keterampilan, dan akses keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

Teori Manajemen Risiko

Program ini juga berlandaskan pada teori manajemen risiko yang mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang dihadapi keluarga miskin. Dengan memahami risiko-risiko tersebut, program dapat menyusun strategi pencegahan dan mitigasi yang efektif untuk melindungi keluarga dari kemungkinan jatuh lebih dalam ke dalam kemiskinan.

Teori Kesetaraan dan Keadilan Sosial

Prinsip kesetaraan dan keadilan sosial menjadi landasan bagi Program Keluarga Harapan, di mana bantuan sosial diberikan kepada keluarga yang memang membutuhkan, tanpa diskriminasi dan favoritisme.

Teori Pengukuran Kinerja

Program ini juga didasarkan pada teori pengukuran kinerja yang mengidentifikasi indikator dan target yang harus dicapai oleh program. Dengan pemantauan dan evaluasi yang tepat, program dapat terus meningkatkan kualitas dan dampaknya dalam mengatasi kemiskinan.

Teori Kolaborasi dan Partisipasi

Program Keluarga Harapan mengedepankan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menghadapi tantangan kemiskinan. Teori ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program.

Teori Inklusi Sosial dan Akses Pelayanan Publik

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses keluarga miskin terhadap pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Dengan cara ini, program ini berkontribusi dalam mencapai inklusi sosial dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh warga masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Rawa Makmur Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu. Waktu penelitian dari bulan Agustus sd Novemver 2022. Teknik pemilihan sampel digunakan teknik purposive sampling yaitu dengan mengambil 3 (tiga) RT yang menjadi penelitian langsung dan juga pihak tertentu yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik ini digunakan berdasarkan tujuan dari penelitian. Populasi yang dipilih dianggap dapat mewakili dan banyak mengetahui mengenai objek yang akan di teliti. Populasi atau objek dalam peneltian ini yaitu sebagai berikut :

1.Kepala Kelurahan Rawa Makmur Permai.

2. Pegawai Lurah Rawa Makmur Permai.
3. Ketua RT 10 Rawa Makmur Permai.
4. Ketua RT 12 Rawa Makmur Permai.
5. Ketua RT 13 Rawa Makmur Permai.
6. Kordinator PKH Rawa Makmur Permai berjumlah 7 (tujuh) orang.
7. Masyarakat yang menjadi sasaran PKH sebanyak 17 (tujuh belas) orang.

Untuk mendapatkan data yang signifikan berdasarkan tujuan penelitian, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut dalam penelitian ini:

1. Observasi.

Observasi yaitu pengamatan atau kunjungan langsung ke Kelurahan Rawa Makmur Permai untuk melakukan penelitian agar mendapatkan informasi yang lebih akurat. Agar dapat mengetahui dan menganalisis berbagai masalah yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 dalam percepatan penanggulangan Kemiskinan melalui Program keluarga Harapan (PKH). Adapun informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah tempat, pelaku, kegiatan, objek, perbuatan.

2. Wawancara

Teknik yang di gunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara. Dimana kegiatan wawancara di lakukan dengan proses tanya jawab secara langsung atau tatap muka antara penanya dengan narasumber untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat mengenai masalah yang akan di teliti.

3. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan kumpulan dokumen yang di anggap penting dan dapat menunjang permasalahan yang akan di teliti seperti jurnal, buku, laporan, literatur majalah dan peraturan perundang-undangan. Dengan teknik ini dapat memberikan peluang kepada peneliti agar dapat memperluas wawasan mengenai masalah yang akan di teliti.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengelompokkan data ke dalam bentuk kategori kemudian menjabarkan kedalam unit-unit memilih mana yang penting dan sudah di pelajari serta membuat kesimpulan agar mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam menganalisis data peneliti mengacu pada beberapa tahap antara lain sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data Melalui Wawancara

Wawancara yang di lakukan terhadap sumber informasi yang dapat memberikan informasi yang akurat terhadap studi kasus penelitian.

2. Reduksi Data

Banyaknya jumlah data yang di peroleh dari data lapangan mengharuskan peneliti untuk mencatat lebih detail dan terperinci, untuk mendapatkan data yang lebih detail memetlukan reduksi data.

3. Penyajian Data

Menyajikan berbagai informasi dari data yang telah dianalisis sehingga memberikan gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian yang dilakukan.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan di lakukan dengan mencari arti pola-pola penjelasan. Sehingga dilakukan dengan teliti dan cermat dengan melakukan beberapa tinjauan ulang pada catatan lapangan sehingga data-data yang di peroleh akurat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Bengkulu adalah ibu kota Provinsi Bengkulu, merupakan kota terbesar kedua di pantai barat Pulau Sumatera setelah kota Bandar Lampung. Kota Bengkulu memiliki luas wilayah sebesar 152.000 km² dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 sebesar 371.828 jiwa yang terdiri atas 187.655 orang laki-laki dan 184.173 orang perempuan. Rawa Makmur Permai adalah salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Muara Bangkahulu yang terdiri dari 15 (lima belas) RT dan 3 (tiga) RT diantaranya berlokasi di RT 10, RT 12, dan RT 13. Adapun Variabel dalam penelitian ini adalah Variabel Independen (X), yaitu Implementasi Perpres Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dan Variabel Dependen (Y), yaitu Program Keluarga Harapan.

Gambaran Umum Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Rawa Makmur Permai

Program Keluarga Harapan (PKH) telah dilaksanakan di Indonesia selama 15 (lima belas) tahun lalu bermula sejak 2007, program tersebut merupakan produk kebijakan kementerian sosial yang bertujuan untuk mengatasi atau menanggulangi masalah kemiskinan. Tahun pertama pelaksanaan PKH yang menjadi daerah percobaan adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Gorontalo. Pada tahun 2013 Program Keluarga Harapan (PKH) mulai dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk di Kota Bengkulu Kelurahan Rawa Makmur Permai.

Jumlah penduduk di Kelurahan Rawa Makmur permai pada tahun 2022 (sumber data Kelurahan Rawa Makmur Permai) yaitu kurang lebih 3.564 jiwa dengan jumlah kepala keluarga kurang lebih 1.385 kepala keluarga (KK). Mata pencarian masyarakat terkhusus RT 10, RT 12 dan RT 13 di kelurahan Rawa Makmur Permai dominan yaitu, petani, berkebun, buruh dan sebagian kecil PNS, TNI, POLRI serta pengusaha. Untuk lebih jelasnya penduduk setiap RT yang menjadi lokasi penelitian ini dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Jumlah Penduduk Lokasi Penelitian

Lokasi	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
RT 10	102	203	305
RT 12	181	176	357
RT 13	219	237	456

Sumber Data : Profil Kelurahan Rawa Makmur Permai 2022

Adapun keluarga Penerima manfaat di lokasi tersebut sebelum dan sesudah adanya Covid pada tahun 2019 - 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Lokasi	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
RT 10	6
RT 12	5
RT 13	6

Sumber data : Pendamping PKH Rawa Makmur Permai.

Dari data tersebut di atas dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Rawa Makmur Permai terdapat seorang personel dari Unit Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (UPPKH) yaitu pendamping PKH. Kehadiran pendamping dibutuhkan guna membantu peserta PKH dalam memperoleh hak yang selayaknya mereka terima dari PKH. Selain untuk kepentingan

peserta, pendamping memiliki tugas pokok antara lain validasi, pertemuan bulanan dan verifikasi. Tugas Pokok ini membantu dalam mendeteksi segala permasalahan dan melakukan tindak lanjut dalam kurun waktu yang cepat dan tepat. Beberapa kategori yang berhak menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dimana disesuaikan dengan keadaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan indeks dan faktor penerima bantuan sosial 2022 yaitu ibu hamil, anak usia dini 0 s.d 6 tahun, pendidikan anak SD/Sederajat, pendidikan anak SMP/Sederajat, pendidikan anak SMA/Sederajat, penyandang disabilitas berat (tidak dapat melakukan aktifitas tanpa bantuan orang lain). Seperti yang dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 3. Kategori Penerima Bantuan Sosial PKH

NO.	Kategori	Jumlah (Rp)
1.	Ibu Hamil/Nifas	Rp. 3.000.000,-
2.	Anak Usia Dini 0 s.d 6 Tahun	Rp. 3.000.000.-
3.	Pendidikan Anak SD/Sederajat	Rp. 900.000,-
4.	Pendidikan Anak SMP/Sederajat	Rp. 1.500.000.-
5.	Pendidikan Anak SMA/Sederajat	Rp. 2.000.000,-
6.	Penyandang disabilitas Berat (Tidak dapat melakukan aktifitas tanpa bantuan orang lain)	Rp. 2.400.000,-
7.	Lanjut Usia 70 thn	Rp. 2.400.000,-

Sumber data : Kategori penerima bantuan Dinas Sosial

Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH)

Sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan yang di gulirkan oleh kementerian sosial, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan yang baik dalam memberikan kontribusi sebagai upaya dalam menanggulangi angka kemiskinan. Berkaitan dengan Program Keluarga Harapan (PKH), tujuan yang terdapat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di 3 (tiga) RT di Kelurahan Rawa Makmur Permai yaitu :

- a) Meningkatkan kondisi sosial ekonomi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
- b) Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak KPM.
- c) Meningkatkan status kesejahteraan dan gizi ibu hamil/nifas,serta anak di bawah usia 6 tahun dari KPM.
- d) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan khususnya bagi masyarakat KPM .

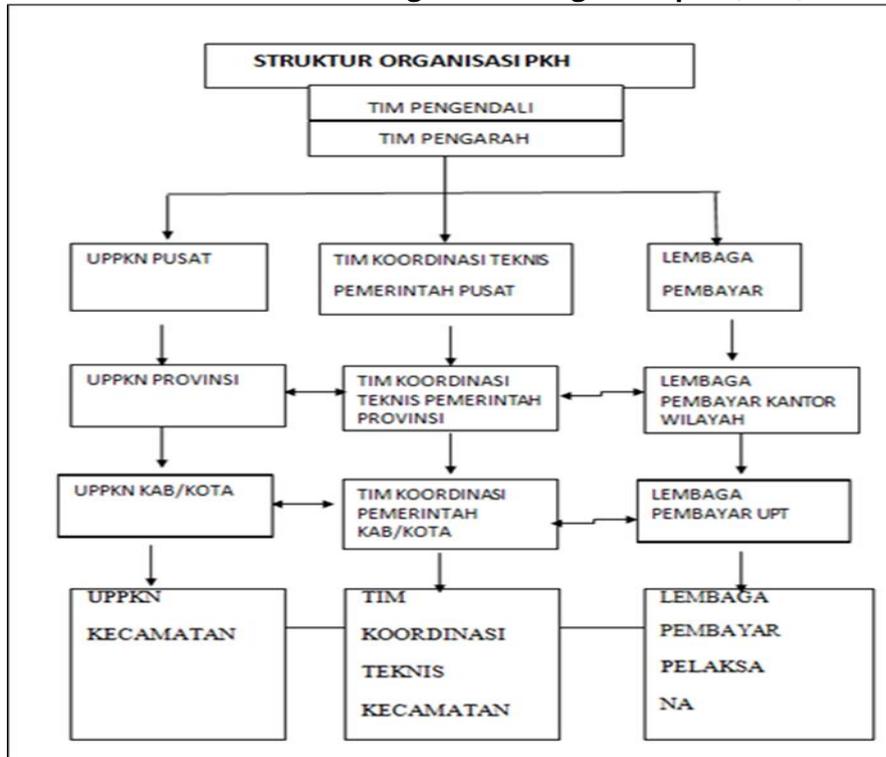
Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses yang menjadi penentu dalam pelaksanaan PKH di 3 (tiga) RT di Kelurahan Rawa Makmur Permai salah satunya yaitu adanya langkah-langkah persiapan pelaksanaan terlebih dahulu agar tujuan yang di inginkan tercapai. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk memeberikan bukti nyata dalam pelaksanaan program terkait dengan pembiayaan maupun untuk mencapai tujuan. Dengan mengetahui hasil dari pelaksanaan PKH di era Covid-19 maka pendamping dapat mengetahui apakah pelaksanaannya sudah berjalan dengan baik atau belum.

Oleh karena itu Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di 3 (tiga) RT di Kelurahan Rawa Makmur Permai masih ada yang belum tepat sasaran di karenakan masih menggunakan data lama dalam menentukan penerimaan program ini oleh karena itu, masih banyak masyarakat yang berhak menerima bantuan tersebut akan tetapi tidak mendapatkan bantuan. Hal ini tentu tidak sesuai dengan orientasi utama PKH dimana memberikan bantuan kepada Rumah Tangga Penerima Manfaat (KPM). Sehingga di butuhkan sebuah monitoring oleh para pendamping PKH yang sangatlah penting agar dalam pelaksanaanya di 3 (tiga) RT di Kelurahan Rawa Makmur Permai dapat berjalan sesuai dengan harapan serta tuju yang ingin di capai.

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) sesuai tujuan yang ditetapkan oleh kementerian sosial yaitu Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas dan balita

serata anak yang berusia 5-7 tahun yang dimana belum masuk sekolah dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Adapun penyesuaian dari program PKH ialah meningkatkan status kesehatan KPM. Dengan program ini keluarga yang menerima bantuan di harapkan memiliki kesehatan yang baik seperti kesehatan untuk ibu hamil, ibu nifas, anak balita serta anak yang berusia 5-7 tahun yang belum terdaftar di sekolah.

Gambar 1 Struktur Program Keluarga Harapan (PKH)



Pada bab ini penulis akan menyajikan data-data yang telah di peroleh dari lapangan selama penelitian di laksanakan. Penelitian ini di laksanakan di 3 (tiga) RT di Kelurahan Rawa Makmur Permai. Yang di mana Program Keluarga Harapan (PKH) adalah suatu program yang memberikan bantuan tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang memenuhi syarat sebagai penerima bantuan. Program Keluarga Harapan (PKH) berujuan agar dapat membantu masyarakat seperti penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosial sesuai dengan amanat konstitusi Presiden RI sehingga PKH memberikan akses pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan dan pendampingan termasuk akses terhadap sebagai program perlindungan sosial yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. Sehingga pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung terhadap informan mengenai Implementasi Peraturan Presiden NO. 15 Tahun 2010 dalam menanggulangi kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) 3 (tiga) RT di Kelurahan Rawa Makmur Permai, yang di mana memfokuskan tiga indikator dari teori Edward III yaitu : (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Struktur Birokrasi.

Adapun hasil penelitian yang berhubungan Implementasi Peraturan Presiden NO. 15 Tahun 2010 dalam menanggulangi kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di 3 (tiga) RT di Kelurahan Rawa Makmur Permai adalah sebagai berikut :

Komunikasi

Adapun komunikasi yang di maksud dalam hal ini adalah penyampaian informasi kepada masyarakat sangatlah penting yang di mana dapat menentukan berhasil tidaknya tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) di 3 (tiga) RT di Kelurahan Rawa Makmur Permai. Komunikasi diperlukan

agar pembuat kebijakan dan pelaksana rencana lebih konsisten dalam mengimplementasikan setiap rencana yang akan di terapkan pada tujuan perencanaan. Ketika meneruskan pesan dalam suatu organisasi atau dari organisasi satu ke organisasi lain, komunikator dapat menyebarkannya dengan sengaja. Selain itu, jika sumber informasi yang berbeda memberikan penjelasan yang bertentangan , maka para pelaksana akan menghadapi kesulitan yang lebih besar dalam upaya mencapai tujuan kebijakan. Sebagaimana komunikasi yang penulis lakukan di RT 10 (sepuluh) sebagai RT pertama yang menjadi lokasi penelitian yang penulis kunjungi, penulis berkomunikasi langsung dengan UJ selaku ketua RT. Informasi yang didapatkan adalah jumlah penerima manfaat program PKH adalah sebanyak 6 (enam) orang dari 305 (tiga ratus lima) jiwa. Menurut informasi juga dikatakan bahwa jumlah penerima tersebut telah melalui seleksi sesuai dengan aturan dan masuk kriteria sebagai penerima PKH. Keenam orang penerima manfaat tersebut benar-benar memerlukan bantuan untuk membantu mengurangi beban hidup selain masuk dalam kriteria yang dapat diberikan bantuan PKH sesuai dengan ketentuan yang telah tersebut di atas.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Des selaku penerima PKH RT 10 ibu Des mengatakan, "Saya mengetahui program PKH, saya juga mendapatkan sosialisasi terkait PKH, sebelumnya saya tidak mengetahui kalo ada PKH sebelum mengikuti sosialisasinya, semua penerima PKH berdomisili di RT 10. Seleksi dalam penerimaan PKH bernilai kompeten karena yang menerima adalah orang-orang yang benar-benar memerlukan bantuan, tidak ada perubahan aturan dalam PKH selain itu kesulitan dalam mengambil PKH adalah ketika ketinggalan KTP dan harus kembali ke rumah untuk mengambil KTP jika tidak, maka tidak diberikan bantuannya saat ke kantor POS untuk pengambilan langsung. Dengan adanya PKH sangat membantu untuk membiayai SPP anak sekolah, pihak terkait PKH yaitu Dinas Sosial dan Ketua RT dan cara kordinasi PKH adalah pihak Dinas melakukan kordinasi dengan pihak terkait seperti kepala lurah dan ketua RT."

Untuk RT 12 (dua belas) terdapat sebanyak 5 (lima) keluarga yang mendapatkan bantuan yang sama dan memenuhi semua kriteria. Berdasarkan keterangan ketua RT 12 penerima rata-rata adalah keluarga dengan memiliki anak usia sekolah dan balita. Semua bertempat tinggal di RT 12 Kel. Rawa Makmur Permai. Penerima PKH tidak memiliki penghasilan tetap yang stabil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Hartati selaku penerima PKH RT 12 ibu Hartati mengatakan, "Saya tidak mendapatkan sosialisasi tentang PKH, saya juga tidak mengetahui sampai akhirnya mendapatkan bantuan, untuk RT 12 semua beralamat atau berdomisili sesuai dengan di RT kami, ya, sesuai domisili sesuai dengan data yang ada sebagai penerima, program PKH ini Kompeten karena yang menerima adalah orang-orang yang benar-benar membutuhkan dan memerlukan bantuan, Setahu saya tidak berubah aturan mengenai PKH mengalami perubahan setiap tahunnya, proses Pengambilan PKH langsung ke kantor pos dengan membawa KTP dan KK, kendalanya pernah ketinggalan KTP di rumah dan harus kembali lagi mengambil KTP jika tidak maka tidak dapat mengambil bantuan tersebut, dengan adanya PKH ini iya sangat membantu karena dapat digunakan untuk membiayai SPP anak sekolah dan membantu untuk makan sehari-hari. Saya juga mengetahui ada 6 orang penerima PKH di RT saya. pihak terkait PKH Mungkin Dinas sosial dan ketua RT."

Sementara RT 13 (tiga belas) yang memiliki jumlah KK kurang lebih 50 (lima puluh) KK mendapatkan 6 (enam) kk sebagai yang paling berhak mendapatkan bantuan PKH. Keenam warga tersebut adalah beberapa yang berhasil lolos dan memenuhi kriteria dan masih ada satu dan dua orang yang tidak terpilih karena tidak memenuhi persyaratan dalam menjadi calon penerima manfaat.

Selain itu penulis juga melakukan wawancara terhadap kordinator/ pendamping PKH sebagaimana yang di ungkapkan oleh AR selaku kordinator PKH di Kelurahan Rawa Makmur Permai, mengungkapkan bahwa :

"Pihak-pihak yang terkait itu mulai dari kepala dinas berkoordinasi dengan unit pelaksana Progrm Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan, kemudian ke pelaksana tingkat Kelurahan yang membentuk penanggung jawab PKH di kelurahan berdasarkan rukun tetangga " (Hasil wawancara

15 Agustus 2022). Berdasarkan hasil wawancara dengan koordinator PKH menunjukkan bahwa para petugas PKH memiliki tugas dan tujuan masing-masing yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui kementerian Dinas Sosial pada dasarnya bertujuan untuk membantu meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Hal ini yang terpenting dalam pelaksanaan program ini adalah masyarakat dapat menyekolahkan anak-anak, dan ibu hamil serta anak-anak dapat menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai tujuan dari program ini.

Namun, pada dasarnya saya melihat tidak semua orang mengetahui Program Keluarga Harapan. Pengetahuan masyarakat dengan adanya PKH ini hanya ketika masyarakat yang bersangkutan menerima program ini saja yang mengetahui akan adanya Program Keluarga Harapan (PKH) Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Arya salah satu penerima bantuan PKH di RT 13 Kelurahan Rawa Makmur Permai, beliau mengatakan bahwa :

“Saya baru akan mengetahui PKH ketika saya di beri tahu bahwa saya menerima bantuan ini, kalau sosialisasi ke masyarakat itu tidak ada” (Hasil wawancara 15 Agustus 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di RT 13 yang bernama Ibu Arya mengatakan, “Bahwa mengetahui adanya program PKH, namun tidak mengetahui adanya sosialisasi terkait program tersebut, dan sejauh ini seluruh yang menerima PKH adalah sesuai dengan alamat domisili, tidak ada perubahan aturan dalam penerimaan PKH, Kesulitan yang dialami tidak begitu berarti yaitu hanya ketinggalan KTP saat ingin mengambil bantuan langsung ke POS.” menjelaskan bahwa penyampaian informasi yang dilakukan pemerintah terkait PKH masih kurang, sehingga di perlukan adanya sosialisasi yang lebih efektif. Adapun bentuk sosialisasi yang di berikan oleh pihak Kelurahan untuk mensosialisasikan Program Keluarga Harapan (PKH).

Berdasarkan komunikasi dengan DR selaku Ketua RT 13 dalam wawancara beliau mengatakan bahwa : “ Komunikasi adalah hal terpenting terhadap masyarakat dengan di adakannya rapat di kantor kelurahan sehingga bantuan sosial ini berjalan dengan semestinya, seharusnya Ketua RT turut dilibatkan dalam sosialisasi ini secara terbuka.” (Hasil wawancara 16 Agustus 2022)

Berdasarkan komunikasi dengan Uj selaku Ketua RT 10 dalam wawancara beliau mengatakan bahwa : “Iya, penerima PKH sesuai dengan alamat domisilinya dan benar diperuntukan bagi keluarga yang tingkat kesejahteraannya dibawah rata-rata.”

Melihat kondisi yang ada di lapangan bahwa cara penyampaian informasi yang di lakukan oleh para pihak pelaksana PKH masih sangat minim, dimana penyampaian informasi hanya melalui pertemuan oleh orang tertentu saja dimana tidak menyampaikan langsung ataupun melakukan penyuluhan kepada masyarakat ataupun memasang spanduk terkait PKH itu sendiri. Sehingga mendia komunikasi sederhana tersebut dapat menghambat kelancaran penyampaian informai PKH. Dengan melihat trealita seperti di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa proses komunikasi yang dimana belum berjalan sebagaimana mestinya sehingga orientasi program ini belum terlaksana dengan baik.

Sumber Daya

Dalam suatu kebijakan tujuan yang di tetapkan sudah jelas dan logis, akan tetapi bukan hanya faktor tersebut yang dapat mempengaruhi dalam proses pengimplementasian suatu program. Akan tetapi faktor sumber daya juga memiliki peran yang sangat penting. Ketersediaan sumber daya dalam menjalankan sebuah program merupakan salah satu faktor yang perlu di perhatikan. Oleh karena itu sumber daya yang di maksud ialah sumber daya manusia dan sumber daya finansial yang dimana untuk mendukung jalannya Implementasi Peraturan Presiden NO. 15 Tahun 2010 dalam menanggulangi kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) khususnya di 3 (tiga) RT di Kelurahan Rawa Makmur Permai. Indikator sumber daya memiliki beberapa elemen yakni :

a) Sumber Daya Manusia

Adapun sumber daya yang utama dalam upaya mengimplementasikan Program Keluarga Harapan (PKH) sumber daya manusia yang dimana sumber daya yang dimaksud ialah pendamping PKH, Pak Lurah, Ketua RT, serta beberapa staf yang tergolong di dalamnya. Ketidak berhasilan dalam implementasi kebijakan salah satunya di sebabkan oleh manusianya yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak memiliki keahlian di bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, akan tetapi diperlukan yang memiliki kemampuan yang sesuai di bidangnya untuk menjalankan program tersebut. Berhubungan dengan sumber daya manusia (SDM). Adapun hasil wawancara mengenai Sumber Daya Manusia dengan bapak KS selaku pendamping PKH di 3 (tiga) RT di Kelurahan Rawa Makmur Permai. yaitu :

“Untuk mengenai informasi kepada kami masih sangat minim atau terbatas untuk menemukan alamat warga penerima PKH kadang tidak sesuai dengan yang tercatat karena ada beberapa penerima yang berpindah dari alamat aslinya namun masih tetap berada di kelurahan yang sama.” (Hasil wawancara 16 Agustus 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pendampig PKH Desa menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala dalam menjalankan Program Keluarga Harapan (PKH) sehingga dapat menghambat berjalannya program tersebut.

Selanjutnya yang berhubungan dengan mutu Implementor Peraturan Presiden NO. 15 Tahun 2010 dalam menanggulangi kemiskinan yang melalui Program Keluarga Harapan (PKH), MN selaku Lurah beliau mengatakan bahwa :

“Pelaksanaan PKH yang cukup kompeten dalam bidangnya sebab pendamping PKH dalam program ini melalui tahap seleksi yang dimana di adakan langsung oleh kementerian sosial” (Hasil wawancara 15 Agustus 2022)

Berhubung dengan informasi tersebut menurut temuan penulis di lapangan mengenai yang di utarakan oleh Pak Lurah penulis menemukan adanya pendamping PKH yang belum mengerti atau memahami betul tentang makna dan penyesuaian dari PKH ini sehingga dalam penyampaian informasi kepada peserta penerima bantuan tersebut belum maksimal. Berdasarkan hasil obsevasii, wawancara serta dokumentasi menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) dapat berjalan dengan baik apabila sumber daya manusia telah terpenuhi serta memiliki kemampuan di setiap bidang masing-masing dalam menjalankan program tersebut.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berhubungan dengan prosedur atau pola yang mengatur agar dalam pengerjaan implementasi suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik. Adapun yang di maksud dengan struktur birokrasi adalah prosedur yang mengatur berjalannya pekerjaan dan pelaksanaan suatu kebijakan. Selain itu kadang kala dalam pelaksanaan suatu kebijakan terdapat tanggung jawab antara beberapa unit pelaksana oleh karena itu di butuhkan koordinasi agar dapat mengontrol suatu implementasi.

a)SOP (Standar Operasi Prosedur)

Pelaksanaan suatu program juga membutuhkan satu prosedur yang menjadi dasar atau standar pelaksanaannya. Adapun menurut AR sebagai koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) mengungkapkan bahwa :

“Aturan-aturan mengenai PKH yang tidak pernah di ubah selama beberapa tahun, sehingga menurut beliau PKH ini sendiri sangat membantu untuk seluruh wilayah kelurahan Rawa Makmur Permai. Aturan untuk pemberian bantuan juga sangat ketat mengingat ini adalah bantuan tunai untuk masyarakat terpilih yang memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat program ini.” (Hasil wawancara 16 Agustus 2022).

Dari penjelasan di atas mengatakan bahwa aturan-aturan dalam PKH itu sangat ketat di karenakan bantuan ini adalah bantuan tunai sehingga perlu ketelitian dalam menyalurkan bantuan agar tepat sasaran dan sesuai dengan syarat penerima bantuan.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan IM selaku peserta penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) mengatakan bahwa :

"Saya pernah di suruh untuk pulang agar pergi mengambil kartu peserta PKH dan membawa kartu keluarga dikarenakan pada saat itu saya lupa membawa." (Hasil wawancara 16 Agustus 2022)

Dapat di lihat dari wawancara di atas bahwa dalam proses pengambilan bantuan sangatlah ketat yang dimana harus membawa bukti atau kartu peserta PKH dan KK. Di sisi lain ibu IM selaku peserta penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) juga mengutarakan bahwa :

"Bantuan ini sangat membantu dari segi perekonomian untuk membantu biaya anak saya sekolah" (Hasil wawancara 16 Agustus 2022). Berdasarkan hasil wawancara serta observasi, penulis melihat dimana prosedur atau aturan yang telah berlaku dengan PKH telah di ikuti serta di patuhi oleh peserta dan pengelola program ini.

Pembahasan

Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan dalam keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terlaksana, apabila pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan.

Adapun hasil penelitian yang di peroleh penulis ialah menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Presiden NO. 15 Tahun 2010 dalam menanggulangi kemiskinan Program Keluarga Harapan (PKH) di 3 (tiga) RT di Kelurahan Rawa Makmur Permai perlu untuk di tingkatkan di mana penyampaian informasi masih sangat minim seperti yang di ketahui pertemuan hanya di lakukan oleh orang tertentu saja.

Sumber Daya

Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumber daya. Dalam suatu kebijakan mungkin tujuan yang di tetapkan sudah jelas dan logis, akan tetapi bukan hanya faktor tersebut yang dapat mempengaruhi dalam proses pengimplementasian suatu program, kan tetapi faktor sumber daya juga memiliki peran yang sangat penting. Ketersediaan sumber daya dalam menjalankan sebuah program merupakan salah satu faktor yang perlu di perhatikan.

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan menunjukkan bahwa sumber daya yang terdapat di 3 (tiga) RT di Kelurahan Rawa Makmur Permai sudah berjalan akan tetapi masih perlu di tingkatkan. Hal ini dapat di ketahui bahwa masih terdapat pendamping PKH yang belum mengerti serta memahami betul tentang makna dan penyesuaian dari PKH.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berhubungan dengan prosedur atau pola yang mengatur agar dalam pengerjaan implementasi suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik. Struktur birokrasi adalah prosedur yang mengatur berjalannya pekerjaan dan pelaksanaan suatu kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh menunjukkan bahwa prosedur atau aturan yang telah berlaku dengan PKH telah di ikuti serta di patuhi oleh peserta dan pengelola program ini. Hal ini dapat di lihat dari wawancara yang telah penulis laksanakan terhadap peserta penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Yang di mana sudah menjadi kewajiban dari penerima bantuan tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Hasil penelitian menunjukan bahwa komunikasi dan birokrasi dalam implementai peraturan Presiden NO. 15 Tahun 2010 tentang percepatan Penanggulangan kemiskinan untuk mengurangi

angka kemiskinan melalui Program PKH di Rawa Makmur Permai secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang nyata dan merupakan hal terpenting dalam terlaksananya dengan baik Perpres NO. 15 Tahun 2010 Tentang tentang percepatan Penanggulangan kemiskinan untuk mengurangi angka kemiskinan melalui Program PKH di Rawa Makmur Permai. Komunikasi dan birokrasi berjalan dengan baik di RT 10 Kelurahan Rawa Makmur Permai.

2. Sumber Daya dalam implementasi penanggulangan kemiskinan melalui program PKH memiliki peran yang tak kalah penting. Ketersediaan sumber daya terutama sumber daya manusia dalam menjalankan Program PKH merupakan satu faktor yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan program PKH di Kelurahan Rawa Makmur Permai. Terutama untuk 3 (tiga) RT yang menjadi fokus penelitian sumber daya manusia yang mencukupi membuat implementasi penanggulangan dapat terlaksana dengan baik dengan adanya sumber daya yang bekerja dengan baik saat sebelum dan sesudah pemberian bantuan.
3. Faktor Penghambat dalam Implementasi Peraturan Presiden NO. 15 Tahun 2010 tentang percepatan Penanggulangan kemiskinan untuk mengurangi angka kemiskinan melalui Program PKH di Rawa Makmur Permai antara lain yaitu peran pendamping dan koordinasi antar dinas terkait.

Saran

1. Di harapkan agar komunikasi yang terdapat di Kelurahan Rawa Makmur Permai lebih di tingkatkan lagi yang mana penyampaian informasi harus diberi tahu langsung ataupun melakukan pertemuan terhadap pendamping PKH dengan penerima bantuan atau biasadi sebut dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
2. Sumber daya perlu di perkuat lagi yang dimana sumber daya yang dimaksud ialah sumber daya manusia perlu di tambah agar dapat mempermudah dalam menjalankan Program Keluarga Harapan (PKH) dan para staf harus memiliki keahlian di bidangnya masing-masing.
3. Struktur birokrasi harus lebih di pertegas agar pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto. (2017). Kotribusi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menunjang Pendidikan Siswa Kurang Mampu Pada Masyarakat Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Antriya Eka Suwinta, I. P. (2016). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Maron Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar. *Kajian Kebijakan Publik*, 1(1), 1–11.
- B.S.Tlonaen, Yudid, Williy Tri Hardianto, C. D. (2014). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1)1, 29–37.
- Mahmud, F. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Kesehatan di Kabupaten Enrekang. *Uiversitas Muhammadiyah Makassar*.
- Muhammad Daud, Y. M. (2018). *Jurnal Humaniora*. *Jurnal Humaniora*, 2(1), 29–38.
- Sasmito, Cahyo, E. R. N. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Batu. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 3(2), 68–74

Perpres No 15, (2010). Peraturan Presiden tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Republik Indonesia.

Wahdaniah,A. (2021). Implementasi program keluarga harapan era covid 19 di Desa Latellang kecamatan Patimpeng Kab. Bone. Universitas Muhammadiyah Makassar.

(<https://Wikipedia.org/KotaBengkulu>) (diakses 5 Agustus 2022)

<https://dinsos.kalbarprov.go.id/blog/2019/03/07/mekanisme-pelaksanaan-pogram-keluarga-harapan>